

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu untuk menunjang kebutuhan kelangsungan hidupnya ialah air. Air dapat diperoleh langsung dari alam atau melalui sumber yang dikelola oleh pihak lain seperti air minum dalam kemasan atau dari PDAM. Karena sifat air merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar oleh manusia, sehingga ketersediannya harus selalu terjaga dengan baik.

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga pengelolaan air bersih tersebut tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Di negara kita pengelolaan air diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada PDAM. Kehadiran PDAM didukung oleh undang-undang No. 5 tahun 1962 yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang air minum bersih, dimana aktifitas PDAM mulai dari mengumpulkan, mengolah dan menjernihkan sampai pada pendistribusian air ke pelanggan atau konsumen.

PDAM merupakan badan usaha yang menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai perusahaan berorientasi sosial dan perusahaan berorientasi laba. Orientasi sosial adalah pelayanan kepada pelanggan didalam penyediaan air bersih sedangkan orientasi laba adalah tujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana operasional dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka merealisasikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk setoran PAD, manajemen PDAM harus memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, infrastruktur produksi dan distribusi, penanganan pelanggan dan pemanfaatan perkembangan teknologi pengelolaan air, dalam rangka mewujudkan efisiensi.

Dalam operasionalnya, PDAM memiliki beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam proses pencapaian akuntabilitas keuangan PT. PDAM. Adapun kendala tersebut antara lain terangkum dalam aspek Keuangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat cakupan pelayanan yang masih rendah, kinerja yang masih rendah, menurunnya potensi sumber daya air baku pada saat kemarau, dan masih tingginya tunggakan pembayaran pelanggan.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, perlu disusun tujuan, sasaran serta indikator keberhasilan yang dirampungkan dalam bentuk rencana strategik. Indikator keberhasilan merupakan alat ukur yang harus dievaluasi secara periodik serta berkesinambungan. Dan selanjutnya dijadikan bahan untuk mengendalikan arah dan mutu pelayanan agar tujuan serta indikator yang telah ditetapkan benar-benar dapat diwujudkan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penganggaran berbasis kinerja di atur dalam permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan

terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan pemerintah tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan anggaran berbasis kinerja dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Sitoyo et al. 2015). Sedangkan Menurut Bahri, (2012) Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran berorientasi pada output.

Akuntabilitasi merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Sedangkan menurut Choirul, (2012) akuntabilitasi ialah suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian karyawan pada PT. PAM Kota Palopo merupakan unsur dari organisasi yang sangat penting. hal ini dikarenakan karyawan sebagai penggerak dan pelaksana setiap perusahaan atau instansi, guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama, bagaimanapun baiknya perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika karyawan sebagai pelaksanaannya tidak bekerja dengan baik. lingkungan kerja dan disiplin kerja dapat terealisasikan dengan adanya tujuan dari perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman dan haruslah di tunjang dengan penganggaran kinerja, karena karyawan sebagai suatu sumber daya yang berkualitas yang akan menjadi pelaksana kegiatan pembangunan pada PT. PAM Kota Palopo, maka diperlukannya suatu anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas yang memadai dengan mengikuti pengembangan sumber daya manusia yang dimana merupakan unsur paling penting dalam pengembangan suatu perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu terletak pada permasalahannya dimana penelitian yang dilakukan Rasma (2015) menjelaskan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi sektor publik adalah terjadinya kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan. Sedangkan penelitian Sari (2017) menjelaskan bahwa melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini, penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan kebutuahn riil setiap unit kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikaji, dalam tujuannya mencapai visi dan misi perusahaan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut saya mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu “apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan PT. PDAM Tirta Mangkaluku kota palopo.

2. Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan referensi yang dapat membantu dalam penelitian sejenis untuk masa yang akan datang.

3. Pembaca

Diharapkan akan menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

4. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan yang positif dan bermanfaat dalam mengevaluasi dan memperbaiki struktur akuntabilitas keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang lingkup

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian keuangan PAM TM Kota Palopo, dimana penelitian ini memiliki 1 variabel yang berperan pada akuntabilitas keuangan PT. PAM . Variabel tersebut adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.

1.5.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka dibuat batasan yang ada pada penelitian ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan PAM TM Kota Palopo.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi bagian yang menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi bagian yang menjelaskan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini berisi bagian yang membahas tentang hasil pembahasan gambaran umum PT. PAM Tirta Mangkaluku, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V. PENUTUPAN

Bab ini berisi bagian yang membahas tentang kesimpulan yang diperoleh merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Anggaran berbasis kinerja

Anggaran merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Menurut Mahmudi, (2016:69) Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut menurut (Halim and Kusufi 2016:48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dan menurut Djayasinga, (2015:35) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*)

dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

2.1.1.2 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Djayasinga, (2015:56) mengemukakan manfaat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi umpan balik bagi sebuah organisasi untuk mengambil langkah untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Organisasi/institusi akan mempunyai rencana kerja yang pasti dan menjadi acuan bagi karyawannya untuk mencapai tujuan itu.
3. Pegawai akan lebih termotivasi bekerja sebab tolak ukur penilaian kinerjanya melalui sistem ini.
4. Bahan untuk promosi atau penundaan jabatan, penghargaan, hukuman atau lainnya jelas dasarnya.
5. Pegawai/karyawan/PNS akan lebih efektif bekerja karena tahu dan jelas apa yang akan dan harus dikerjakannya untuk satu periode ke depan.
6. Dapat menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik.
7. Dapat membantu masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang sudah diberikan/disediakan.
8. Merupakan sebuah alat komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim and Iqbal, (2012:178) dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran** Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
2. **Disiplin anggaran** Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
3. **Keadilan anggaran** Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
4. **Efisiensi dan efektivitas anggaran** Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan

dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

2.1.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim and Kusufi, (2016:57) dijelaskan bahwa keunggulan dan kekurangan dari anggaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah:
 - a. Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja.
 - b. Pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja.
 - c. Menghindari pemborosan.
2. Kelemahan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
 - b. Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.

- c. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (*cash basis*).
- d. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.

Menurut Choirul, (2012) akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pegawai pemerintah terhadap publik yang menjadi konsumen pelayanannya. Hal ini terkait dengan pemikiran/konsep masyarakat yang demokratis. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2012:20) akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Mahmudi, (2010:28), yang mengutip dari Hopwood, tomskin (1984: Elwood (1993) Aspek atau dimensi akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik menjelaskan bahwa terdapat 5 aspek adalah :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan otorisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara efisien dan efektif, akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Efisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kliennya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi yang hendaknya merupakan program bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam membuat kebijakan lembaga

publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, *stakeholder* mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.2.2 Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap

seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya financial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ketahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif . Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Probity and legality accountability Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance).

2. Process accountability Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. Performance accountability Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. Program *accountability* Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. Policy accountability Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan menciptakan system pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.2.3 Macam - Macam Akuntabilitas

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) Pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban pada masyarakat luas.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi, (2011:19) dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

- a. Kepatuhan terhadap hukum.
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Proses.

- a. Adanya Kepatuhan terhadap Prosedur.
- b. Adanya pelayanan publik yang responsif.

- c. Adanya pelayanan publik yang cermat
- d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.

3. Akuntabilitas program

- a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
- b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
- b. Mempertimbangkan dampak di masa depan

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad F. Syawie, David P.E.Saerang, & Winston Pontoh (2016), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bitung	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel penelitian ini, yaitu: Penganggaran Berbasis Kinerja (X) dan Pengendalian Kinerja (Y).	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian kinerja.
2	Ira Halidayati (2014), Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implentasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja	Penelitian ini menggunakan penelitian kausatif. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini, yaitu: Pengawasan Internal (X_1),	1. Pengawasan internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah 2. Pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah

	Pemerintah Daerah	Pengawasan Eksternal (X_2), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X_3), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).	3. Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah
3	Muhammad Kamil (2017), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan pengujian statistik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi, uji regresi sederhana, dan uji t. Variabel penelitian ini, yaitu: Penganggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja (Y)	Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
4	Espinoza (2014), Pengaruh Penerapan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio keuangan daerah . Variabel penelitian ini yaitu: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja Keuangan (Y)	Dengan dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja tidak memberikan peningkatan secara kesekuruhan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Medan.
5	Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji <i>Partial Least Square</i> . Variabel penelitian ini yaitu: Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Y).	pengaruh signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi sebagai variabel <i>intervening</i> .
6	Made Budi Sastra Wiguna,dkk (2015), Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis data yaitu	(1) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah

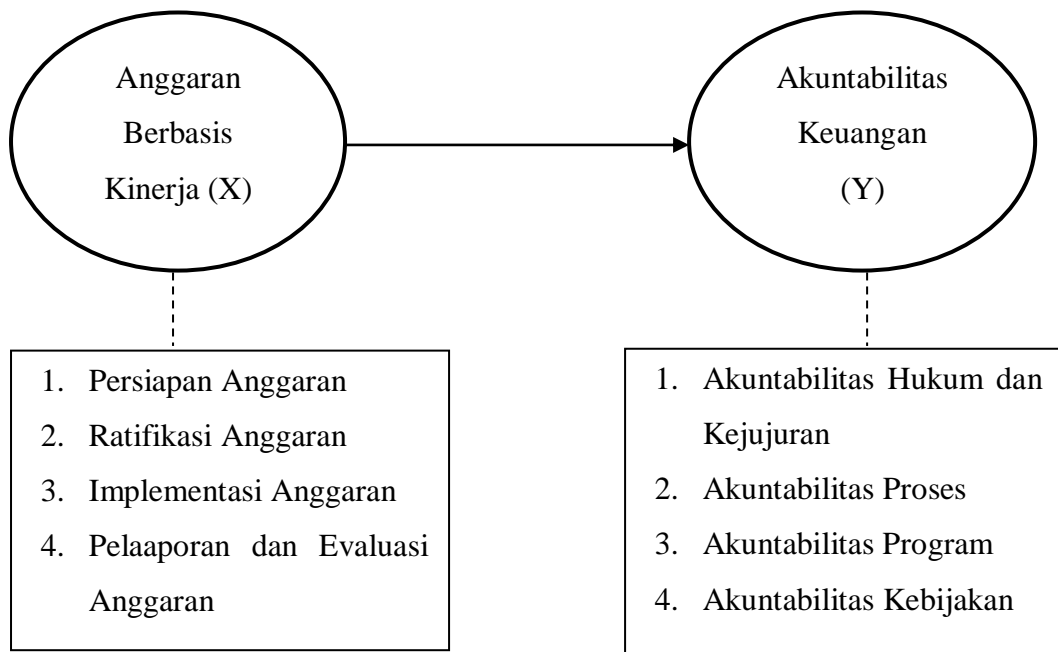
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini yaitu: Pengawasan Keuangan Daerah (X_1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X_2), Transparansi Pengelolaan Keuangan (X_3), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).	Kabupaten Buleleng, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
7	Dendy Syaiful Akbar & Ruhiyat (2016), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi dan uji t. Variabel Penelitian ini yaitu Anggaran Berbasis Kinerja (X_1), dan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
8	Widya Martha (2014), Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah	Penelitian ini menggunakan desain penelitian explanatory dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini yaitu : Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	secara parsial dan simultan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Besar pengaruh transparansi dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 18,5%, sedangkan akuntabilitas dalam

			memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja
9	Elzhara Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji <i>Partial Least Square</i> . Variabel penelitian ini yaitu: Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Y).	Terdapat pengaruh signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi sebagai variabel <i>intervening</i> .
10	Wahdatul (2014), Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Variabel penelitian ini, yaitu: Anggaran Berbasis Kinerja (X_1), Sistem Pelaporan Keuangan (X_2) dan Akuntabilitas Kinerja (Y)	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung.

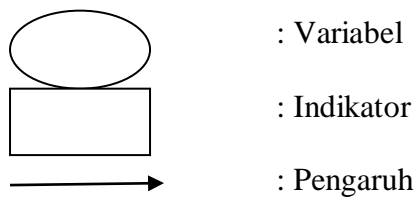
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja (X) sebagai variabel bebas dan Akuntabilitas Keuangan (Y) sebagai variabel terikat. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum ada jawaban empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan

Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Akuntabilitas Keuangan merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan menggunakan analisis data statistik, yakni menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang berlokasi di jalan Pongsimpin, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Waktu penelitian dua bulan, yaitu mulai bulan April sampai Mei 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Ismayanto, Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang didalamnya dapat memperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Sitoyo et al. (2015:64). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data karyawan perusahaan, sejak berdirinya PT. PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam

penelitian ini yaitu data karyawan perusahaan pada PT. PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2016-2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari data laporan keuangan pada PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2016-2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Menurut Sugiyono, (2018:213) Data primer adalah data yang diperoleh dari angket dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihn jawaban yang telah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau keusioner yang dibagikan kepada responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah Kuesioner yaitu metode dimana peneliti menyusun pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018:38) “ Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas atau Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X).

2. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah Akuntabilitas Keuangan (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Sugiyono, (2018:92) menyatakan bahwa Instrumen penelitian adalah suatu alat digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk skala *Likert*. Sugiyono, (2018:93) bahwa “*Skala Likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala *likert* dengan bentuk *checklist*. Dalam skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala *Likert* Penelitian

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Netral (N)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

3.7.1 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel atau konstruk. Uji reabilitas menyatakan bahwa sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Sugiyono, (2018:130). Uji reabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan 0,6 dimana jika nilai-nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reabilitas yang memadai. Sebaliknya, *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.7.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Sugiyono, (2018:125). Uji validitas dalam penelitian ini adalah dengan menghitung korelasi antar skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science). Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $<0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data adalah berkenan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dengan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistic atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sugiyono, (2018:285)

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisi Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Sugiyono, (2018:147).

3.8.2 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah suatu metode statistic yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan variabel independen. Denny, (2012).

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X = Anggaran Berbasis Kinerja

a = konstanta

b = koefisien regresi

c = error

3.8.3 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Korelasi Pearson

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk menyatakan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Akuntabilitas Keuangan (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Menurut Sugiyono (2018:237) koefisien korelasi pearson dirumuskan sebagai berikut:

$$(r_{xy}) \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

R_{xy} : Koefisien korelasi variabel x dan y

N : Banyak pasangan variabel x dan y

Besarnya koefisien korelasi adalah -1 r 1 :

1. Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2. Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi :

1. Jika $r = -1$ atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y

turun atau sebaliknya).

2. Jika $r = +1$ atau mendekati $+1$, maka hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali,2016). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis di tolak, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis di terima, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. PAM Kota Palopo

Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu khususnya di Kota Palopo dimulai sejak tahun 1941 yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan pengambilan sumber air di sungai Mangkaluku Desa Murante, Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang dengan status unit pelayanan air minum. Pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dilakukan rehabilitasi pada instalasi tersebut oleh proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB) Sulawesi Selatan (sekarang P3P), sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980 maka unit pelayanan air minum bersih status menjadi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu di mana secara efektif beroperasi pada tahun 1981 dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengurusan sarana penyediaan air minum sesuai prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya dalam hal penyediaan air minum yang sehat.
- c. Dijadikan suatu badan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu bentuk usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 12 Tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dialih statuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan berita acara penyerahan pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh direktur air bersih kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh wakil Gubernur pada tanggal 2 Januari 2004.

Bertolak dari keputusan Bupati Luwu No. 02 tahun 2004 tentang Penyerahan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kota Palopo kepada daerah Kota Palopo dengan berita acara penyerahan Nomor: 539/008/HUK/2004 sehubungan dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai kota otonom berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo dan pada saat itulah PDAM Kabupaten Luwu berubah menjadi PDAM Kota Palopo Nomor 08 tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku merupakan salah satu perusahaan air minum yang terbesar di Kota Palopo. Perusahaan air minum yang terletak di Jl. Pongsimpin tersebut memiliki fungsi untuk menyalurkan air hasil olahan untuk memenuhi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Kota Palopo, luas bangunan areal secara keseluruhan yaitu 2,7392 ha dan luas bangunan 2,6912 ha. Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo memberikan pelayanan air minum untuk penduduk wilayah Kota Palopo hampir seluruh daerah kota.

Sistem pengolahan air minum di Kota Palopo terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan jumlah 7 unit dan type unit pengolahan lengkap

yang memanfaatkan sungai Latuppa, Mangkaluku, Maggadang, dan Buludatu, yang terdiri dari 6 IPA paket, 3 IPA konvensional dan 2 reservoir. Kapasitas produk air hasil dari pengolahan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo dalam keadaan normal berkisar 372,5 liter/detik. Sarana penting lain yang juga terdapat di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo adalah kantor, musholla, dan gudang penyimpanan peralatan instalasi.

A. Visi dan Misi PAM TM Kota Palopo

1. Visi

Sebagai salah satu perusahaan air minum dibidang pelayanan air minum melalui pengelolaan berwawasan lingkungan.

2. Misi

- a. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan air minum secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.
- c. Melestarikan sumber air.

4.1.2 Deskriptif Responden

Responden penelitian ini adalah pegawai PT. PAM TM Kota Palopo. Untuk menjabarkan latar belakang responden yang menjadi sampel penelitian, berikut ini deskripsi profil responden berdasarkan: umur, lama bekerja, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kusioner yang disebar	80
2	Kuesioner yang dikembalikan	70
3	Kuesioner yang tidak dikembalikan	10
4	Tingkat pengembalian	$70/80 \times 100\% = 87,5\%$

Sumber: Data Primer yang diolah,2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa 80 kuesioner yang disebar, terdapat 10 kuesioner yang tidak mendapat respon atau tidak dikembalikan. Sehingga presentase tingkat pengembalian kuesioner adalah 87,5%.

Penyebaran sebanyak 80 kuesioner pada tanggal 28 Juli 2021 dan pengembalian kuesioner 06 Agustus 2021, sebanyak 70 kuesioner dikembalikan dapat diolah seluruhnya. Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	< 30 Tahun	27	38,57%
2	30-40 Tahun	33	47,14%
3	> 40 Tahun	10	14,29%
4	Total	70	100%

Sumber: Data Primer yang diolah2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dengan umur < 30 tahun sebanyak 27 orang (38,57%), umur 30-40 tahun sebanyak 33 orang (47,14%), dan umur > 40 tahun sebanyak 10 orang (14,29%). Adapun karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Lama Bekrja	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-Laki	40	57,14 %
2	Perempuan	30	42,86%
3	Total	70	100%

Sumber: Data Primer yang diolah,2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki 40 orang (57,14%) sedangkan responden jenis perempuan sebanyak 30 orang (42,86%). Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	SMA/SMK	20	28,57%
2	D3	5	7,14%
3	S1	45	64,29%
4	S2	-	
5	Total	70	100%

Sumber: Data Primer yang diolah,2021

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	70	30	50	42,56	3,888
Total_Y	70	30	50	41,63	4,669
Valid (listwise)	N 70				

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 70, dari 70 data sampel Akuntabilitas Keuangan (Y), nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 50, diketahui nilai mean sebesar 41,63, serta nilai standar deviasi sebesar 4,669 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standard sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dari 70 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 50, nilai mean sebesar 42,56, serta nilai standar deviasi sebesar 3,888 artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur data pada suatu kuesioner valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap butir pernyataan responden dengan total skor variabel sehingga diperoleh nilai pearson correlation. Untuk mengetahui valid tidaknya butir pernyataan dapat menggunakan rumus $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid, Sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dikatakan tidak valid. Penentuan r_{tabel} yaitu $df = N - k$ dengan taraf signifikansi 5%. Adapun data hasil uji validitas penelitian ini, disajikan pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	X1	0,855	Valid
		X2	0,864	Valid
		X3	0,862	Valid
		X4	0,851	Valid
		X5	0,857	Valid
		X6	0,853	Valid
		X7	0,854	Valid
		X8	0,864	Valid
		X9	0,872	Valid
		X10	0,863	Valid
2	Akuntabilitas Keuangan	Y1	0,557	Valid

(Y)	Y2	0,630	Valid
	Y3	0,697	Valid
	Y4	0,644	Valid
	Y5	0,675	Valid
	Y6	0,706	Valid
	Y7	0,807	Valid
	Y8	0,649	Valid
	Y9	0,703	Valid
	Y10	0,763	Valid

Dari tabel diatas, instrumen keusioner yang terdiri dari beberapa butir pernyataan dinyatakan valid. Karena korelasi antara masing-masing skor pernyataan lebih besar dari r tabel yakni 0,235 dan dibawah 0,05.

4.1.4.2 Uji Reabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran kembali terhadap gejala yang sama maka dalam penelitian ini dilakukan uji reabilitas. Suatu data atau instrument dikatakan reliabel apabila data yang digunakan tersebut beberapa kali diukur dengan objek yang sama menghasilkan jawaban atau data yang sama pula. Dalam uji reliabilitas digunakan teknik cronbach's alpha. Pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan nilai *cronbach's alpha* dimaksud, dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,872	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,913	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas, semua variabel yang menjadi instrument dalam penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tingkat reliabilitas yang tinggi dengan nilai cronbach's alpha $> 0,6$ sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel.

4.5 Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan variabel independen. Adapun hasil uji regresi sederhana mengenai data penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,454	5,978		4,592	,000
	Total_X	,333	,140	,277	2,381	,020

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear sederhana yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 27.545 + 0.333 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui beberapa hal, berikut pejelasanannya:

- Nilai konstanta sebesar 27.545 dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas dalam hal ini anggaran berbasis kinerja dianggap konstan, maka akuntabilitas keuangan akan mempunyai Nilai sebesar 27.545.
- Koefisien regresi Anggaran Berbasis Kinerja (X) sebesar 0.333 menggambarkan bahwa apabila variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) meningkat 1 poin, maka akan mengakibatkan peningkatan pada akuntabilitas keuangan sebesar 0.333 atau 33,3%.

4.1.8 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Tabel 4.9

Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,277 ^a	,077	,063	4,519

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan tabel 4.9 koefisien korelasi sebesar 0,277 atau 27,7% artinya hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan masih sangat lemah. Sedangkan koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* sebesar 0,063 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yang terdiri dari anggaran berbasis kinerja terhadap variabel dependen adalah sebesar 6,3% sedangkan sisanya sebesar 93,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih besar faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

4.1.8 Uji t

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,454	5,978		4,592	,000
	Total_X	,333	,140	,277	2,381	,020

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial) adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian mempunyai

probabilitas sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}} 2,381 > t_{\text{tabel}} 1,667$. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan dapat diterima. Artinya jika anggaran berbasis kinerja meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas juga mengalami peningkatan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Dalam Penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya jika anggaran berbasis kinerja ditingkatkan, maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat, sebaliknya jika anggaran berbasis kinerja menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun. Hal ini menandakan bahwa anggaran berbasis kinerja yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada akuntabilitas keuangan.

Anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting dalam lingkup pemerintahan atau perusahaan karena dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan. Anggaran dapat digunakan sebagai instrumen akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan. Adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan hasil yang hendak dicapai maka akan memudahkan terciptanya transparansi sehingga pegawai akan dengan mudah untuk mengawasi kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari (2017) menyatakan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Ntoi (2013) menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila anggaran berbasis kinerja meningkat maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila anggaran berbasis kinerja menurun maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
2. Selain menggunakan kuisioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan wawancara atau interview. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim. 2007. *Teori Belajar Dana Pembelajaran*. Jakarta: Rineka.
- Bahri, S. P. 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Studi Pada Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Bandung. Universitas Pasundan."
- Choirul, Saleh. 2012. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 1, E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan."
- Djayasinga, Marselina. 2015. *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, and Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Sitoyo, Sandu, Ali, and Sodik. 2015. *Dasar Metodologi*. Yogyakarta: Literasi

Media Publishing.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Muhammad F. Syawie, David P.E.Saerang, & Winston Pontoh (2016), Pengaruh

Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja

Pada Dinas Pendidikan Kota Bitung.

Ira Halidayati (2014), Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah.

Muhammad Kamil (2017), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Espinoza, (2014), Pengaruh Penerapan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja

Kuangan Pemerintah Kota Medan.

Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai

Variabel *Intervining*.

Made Budi Sastra Wiguna, dkk (2015), Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah,

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Dendy Syaiful Akbar & Ruhayat (2016), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Widya Martha (2014), Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah.

Elzhara Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Intervening*.

Wahdatul (2014), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.